

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA-INDONESIA
=====

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian
=OFFICE FOR JUSTICE & PEACE=

Tel: (62) (967) 534 993

Fax: (62) (967) 536 427

E-mail: sekkp@jayapura.wasantara.net.id

Jayapura, 26 Juni 2000

No.: 079/TB/00/1.5. + 7.1.
Re.: Rangkuman Situasi Papua
Ref: Pandangan Pimpinan Gereja Katolik

Gambaran permasalahan di Papua

PRESENTASI MASALAH PAPUA

Oleh

Pimpinan Gereja Katolik di Papua

dalam

PERTEMUAN DENGAN PRESIDEN R.I.

Tgl. 27 Juni 2000

I Latarbelakang

1.1. Sikap dasar Bangsa Papua

Pertama-tama perlu dicatat bahwa Bangsa Papua memiliki satu sikap yang sangat mendasar, ialah: keinginan untuk “mengatur diri”. Selama sejarah eksistensinya Bangsa Papua telah membuktikan bahwa bisa mengatur diri hingga dapat melestarikan keberadaannya selama berabad-abad; sikap dasar itu juga ditunjukkan oleh Bangsa Papua berhadapan dengan siapa saja atau instansi mana saja yang memberikan kesan mau mengurangi peluang baginya untuk mengatur diri. Sikap itu diperlihatkan dalam pertemuan dengan pemerintah Belanda, misionaris-misionaris, pedagang-pedagang, dan para pepadat pada umumnya. Maka tidak mengherankan bahwa instansi yang ingin ‘menguasai’ Bangsa Papua lazimnya lari pada penggunaan kekerasan. Mengingat sikap dasar tadi, jadi tidak mengherankan pula bahwa tanggal 1 Desember 1961 tertera dengan huruf emas dalam sejarah Bangsa Papua, karena pada saat itu pemerintah Belanda sudah memberikan perspektif yang sangat cocok dengan sikap dasar tadi, ialah memulai “proses kemerdekaan”. Kehilangan perspektif itu dalam suatu percaturan politik internasional selama tahun enam puluhan akhirnya meninggalkan bekas-bekas luka yang sangat mendalam.

1.2. Tiga unsur faktual

Sambil mengingat sikap dasar sebagaimana dirumuskan di atas, perhatian khusus perlu diberikan kepada tiga unsur faktual yang turut melatarbelakangi persoalan di Papua dewasa ini:

1. Suatu kompleks pengalaman selama puluhan tahun terakhir ini yang lazimnya disebut “Memoria Passionis” yang kolektif, atau “ingatan penderitaan sebangsa”. Pengalaman-pengalaman penderitaan bersumber pada:
 - a. pada kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan Pemerintah Indonesia selama 38 tahun terakhir ini.
 - b. terjadinya puluhan pelanggaran HAM di wilayah Papua selama Papua diintegrasikan kedalam Republik Indonesia.
 - c. kehadiran serta tingkahlaku ABRI di wilayah ini yang lazimnya ditandai suatu sikap arogan dan main kuasa sewenang-wenang.
2. Kejadian-kejadian selama sejarah Bangsa Papua seperti:
 - a. Program kemerdekaan yang diprakarsai oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 1 Desember 1961, dengan [1] mengangkat wakil-wakil masyarakat setempat menjadi 50% dari jumlah anggota Nieuw Guinea Raad (DPR), [2] mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Belanda, dan [3] mensosialisasikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”.
 - b. Penetapan “New York Agreement” (NYA) pada tahun 1962, yang dijadikan dasar peralihan Nederlands Nieuw Guinea dari kekuasaan pemerintah Belanda kepada kekuasaan pemerintah Indonesia. Kesepakatan dasar ini ditetapkan tanpa pengambilan bagian oleh Bangsa Papua sendiri didalam perundingan.

- c. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, yang dilaksanakan secara tidak benar karena disertai intimidasi, paksaan, penganiayaan, dan dengan menafsirkan secara sepihak isi persyaratan pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam NYA, hingga bercacat hukum.
3. Protes masyarakat selama ini yang tidak pernah didengar atau ditanggapi dengan serius oleh pihak yang berkuasa, maka
 - a. Bangsa Papua tidak pernah merasa diri diakui martabat serta jati dirinya sebagai manusia sejati.
 - b. Bangsa Papua tidak pernah merasa diri diakui dan dilindungi sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya dengan segala hak serta kewajibannya sebagai warga negara, seperti digariskan dalam alinea ke-4 pembukaan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945)

1.3. Diam karena tak berdaya

Penderitaan sebagaimana dirangkumkan diatas ini akhirnya menghasilkan suatu masyarakat yang sangat kecewa, yang diam, yang takut, yang merasa dikucilkan, yang di-obyek/proyek-kan dan yang menyimpan kemarahannya selama sekian banyak tahun. Sudah tentu bahwa suatu ketika “ingatan penderitaan kolektif” ini akan terungkap dan akan menjadi sumber ‘kekuatan perjuangan’ asal diberikan kesempatan.

1.4. Bahan penjelasan

Banyak tulisan membantu memperjelaskan lebih lanjut apa yang dirangkumkan diatas ini. Kami lampirkan tulisan-tulisan sbb.:

1. laporan dari Romo Haripronoto SJ, tahun 1967, yang berjudul: “Retrospeksi terhadap Orde Baru satu setengah tahun di Ibukota Irian Barat”.
2. tulisan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura, Maret 1999, yang berjudul: “Dialog Nasional Papua, sebuah kisah ‘Memoria Passionis’”.
3. laporan Kelompok Peduli Masyarakat, Kecamatan Kiwirok, Juni 2000, dengan judul: “Kasus pembunuhan terhadap Heapkauweng Taplo”.
4. sejumlah laporan khusus yang diterbitkan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura, mengenai pelanggaran HAM di Papua.

II Pengembangan Gerakan Aspirasi M(erdeka)

Pengembangan gerakan aspirasi M (GERASEM) terjadi melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pada awalnya (kurun waktu Mei 1998 – Juli 1998) ketidakpuasan masyarakat Papua terungkap melalui sejumlah demo yang untuk sebagian berhubungan dengan unsur-unsur kebijakan tertentu, seperti: program transmigrasi, penyangkalan hak ulayat atas tanah, eksploitasi sumber-sumber alam, kurangnya peluang bagi masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam administrasi kenegaraan, dsb., dan untuk sebagian berhubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM.
2. Setelah peristiwa berdarah di Biak (6 Juli 1998) protes mulai berubah nadanya menjadi 'lebih politik', karena Bangsa Papua merasa sangat terpukul ketika demo damai di Biak selama era reformasi ternyata masih dapat ditanggapi oleh aparat keamanan dengan memakai kekerasan melulu.
3. Menjelang Dialog Nasional (Februari 1999) nada politik makin kuat terdengar. Tidak mengherankan bahwa dalam pertemuan langsung antara 100 wakil Bangsa Papua (Tim 100) dengan Presiden Habibie dikatakan dengan jelas bahwa Bangsa Papua sudah merasa jenuh, sudah tidak percaya lagi pada pemerintah Indonesia dan minta dengan sangat supaya kemerdekaan/kedaulatan Papua diakui saja sesuai dengan kenyataan yang telah terdapat pada tahun 1961.
4. Pernyataan di depan Presiden serta kabinetnya disambut dengan hangat oleh masyarakat luas Papua. Sambutan ini merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa masyarakat luas memang mendukung arah perjuangan yang terungkap. Dalam kelanjutannya masyarakat mulai mengorganisasi diri melalui Posko-Posko, suatu pengorganisian masal yang sangat sederhana namun yang menjadi sarana sosialisasi perjuangan bersifat "aspirasi M". Aspirasi M sudah menjadi buah bibir masyarakat pada segala tingkat serta lapisannya.
5. Selama itu secara intern keorganisasian GERASEM belum berkembang dengan pesat, maka tetap kelihatan agak semu dalam kepemimpinan maupun programnya. Kepemimpinan mulai dijadikan suatu unsur pembahasan yang jelas setelah 12 November 1999, sewaktu Theys Eluay mengumumkan rencana supaya bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua mulai tanggal 1 Desember 1999.
6. Mulai pada tanggal 1 Desember 1999 beberapa tokoh/pemimpin baru muncul dan mulai mengarahkan GERASEM dengan membawa aspirasi Bangsa Papua ke DPRD dan DPR Pusat. Sementara saat kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid pada tgl. 31 Desember 1999 dimanfaatkan untuk menyampaikan langkah awal suatu pemantapan keorganisasian dengan mengumumkan rencana untuk mengadakan suatu Kongres Papua. Pada saat yang sama Presiden Wahid menyetujui supaya nama Irian Jaya diubah menjadi Papua, dan untuk

pertama kalinya secara resmi pemerintah Indonesia meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM selama ini.

7. Akhir-akhir ini pemantapan keorganisasian dijalankan dalam dua tahap: [a] pengadaaan Musyawarah Besar, 24-28 Februari 2000, dan [b] Kongres Papua II, 29 Mei – 4 Juni 2000. Dalam perkembangan terakhir suatu “partai politik” didirikan sebagai sarana untuk memajukan Aspirasi M, hingga pada tanggal 23 Juni 2000, Front Nasional Papua (FNP) diresmikan dibawah pimpinan Bp. Herman Wayoi, seorang tokoh sejarah Papua.
8. Selama proses pemantapan keorganisasian ini terdapat suatu pergeseran tekanan pada aspek-aspek perjuangan. Jika pada awal perjuangan banyak tekanan diberikan kepada “penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM” dalam perkembangan terakhir tekanan makin diletakkan pada “pelurusan sejarah” sebagai dasar serta arah perjuangan.

Sebagai bahan pelengkap dapat kami sebutkan:

9. resolusi Kongres Papua II
10. tulisan yang berjudul: “Kata Hati Tom Beanal” cetakan ke-2, Juni 2000 (terlampir)
11. tulisan oleh Dr. Benny Giyai, yang berjudul: “Menuju Papua Baru”, Mei 2000

III Tanggapan oleh Pemerintah dan Aparat Keamanan

Selama GERASEM berkembang pihak berkuasa tidak diam dan mengambil sikap; sikap itu tidak selalu jelas dan kurang jelaspun siapa yang menentukan sikap itu. Kami dapat mencatat sejumlah hal sbb.:

1. Pada awal gerakan masyarakat (kurun waktu Mei 1998 - Februari 1999) baik pemerintah maupun aparat keamanan menerima kenyataan bahwa dalam era reformasi sejumlah demo dibiarkan saja terjadi. Tidak ada tanggapan yang bersifat pro-aktif dan lazimnya semua permasalahan dinilai oleh penguasa wilayah sebagai “bahan yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang”. Ada satu kekecualian, yaitu dalam tanggapan terhadap demo damai di Biak bulan Juli 1998 yang diakhiri oleh TNI dengan memakai suatu kekerasan yang luar biasa besar. Dengan demikian juga TNI makin kehilangan segala kepercayaan dari pihak masyarakat.
2. Sementara nada politik berkembang (aspirasi M) pihak pemerintah membatasi diri dengan mengulangi (lebih-lebih melalui suara Gubernur) bahwa aspirasi M adalah aspirasi segelintir orang saja.
3. Seusai pertemuan dengan Habibie (Febr. 1999) sementara waktu segala pihak bungkam seribu bahasa, seakan-akan tidak tahu mau bersikap bagaimana. Hanya terdapat sejumlah kejadian intimidasi terhadap orang yang berkaitan dengan Tim 100; tidak diketahui siapa-siapa ada di belakang aksi-aksi intimidasi itu.
4. Pada 17 April 1999 pihak kepolisian mulai mengambil sikap yang lebih tegas dengan menerbitkan maklumat Kapolda yang berisi [a] melarang berfungsinya Posko-Posko, karena dinilai sebagai ‘unit-unit politik’ yang menghasut masyarakat dan [b] melarang segala sosialisasi hasil pertemuan dengan Habibie. Pengambilan sikap ini mendapat tanggapan keras dari unsur pimpinan gerakan M, dan akhirnya pelaksanaan Maklumat Kapolda kurang dilaksanakan.
5. Melalui surat dari Departemen Imigrasi (tgl. 5 Agustus 1999) lima tokoh yang berkaitan dengan kegiatan Tim 100 dinyatakan dicekal dan tidak boleh mengadakan perjalanan ke luar negeri selama 6 bulan. Tidak pernah menjadi jelas siapa-siapa meminta atau mendorong sampai surat itu terbit, malahan diragukan apakah betul bahwa 5 lima tokoh ini pernah dicekal dengan resmi?, atau dengan kata lain: boleh saja bahwa surat itu ada semacam ‘surat buatan’.
6. Lebih daripada menanggapi aspirasi masyarakat, pemerintah mulai menggolkan rencana pemekaran wilayah menjadi tiga propinsi. Rencana ini dinilai oleh masyarakat luas sebagai rencana pemerintah pusat saja, dan ditolak dari awal mula sebagai suatu manuver politik. Yang sangat mengherankan ialah bahwa pemerintah tidak pernah mau mendengar masyarakat dalam hal ini, malahan sampai secara diam-diam melantik dua Gubernur baru pada tanggal 12 Oktober di Jakarta. Tindakan ini mendapat suatu reaksi keras dari

masyarakat dan pemerintah baru akhirnya “me-lemaries-kan” rencana ini.

7. Disamping menggolkan pemekaran wilayah, pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan “otonomi khusus” sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat Papua. Baik karena konsep otonomi tidak jelas maupun karena otonomi khusus dinilai sebagai “jawaban yang tidak menjawab masalah sebenarnya” konsep otonomi terus ditolak oleh masyarakat.
8. Dalam suasana yang menghangat ini, di beberapa tempat (Sorong, Genyem) bendera Bintang Kejora dinaikkan lagi (awal bulan Juli 1999), dan aparat kepolisian memanfaatkan kejadian itu untuk bertindak terhadap unsur-unsur pimpinan Posko Papua, terutama di Sorong.
9. Suatu perubahan sikap mulai diperlihatkan oleh aparat keamanan setelah pertemuan di Sentani pada tgl. 12 November 1999. Pertemuan ini turut dihadiri baik oleh pihak keamanan maupun oleh Yorris Raweyai. Rencana untuk menaikkan bendera Bintang Kejora di seluruh wilayah Papua diumumkan selama pertemuan itu, dan pihak keamanan menanggapi dengan menyatakan: “boleh saja, karena merupakan pengungkapan aspirasi rakyat”. Sikap ini mengagetkan banyak orang dan menimbulkan rasa curiga; jangan-jangan sampai nanti penaikan bendera akan dipakai untuk bertindak secara sangat keras. Kecurigaan bertambah mengingat bahwa pihak pemerintah sipil dari awal mula menyatakan bahwa rencana itu tidak dapat diterima dan merupakan suatu pelanggaran hukum. Kebingungan bertambah karena dalam kurun waktu dua minggu pihak keamanan mengubah sikapnya dari “boleh saja” menjadi “naik bendera itu melanggar hukum”. Perubahan sikap ini mendorong hakim di Sorong yang sedang memproses pelaku-pelaku penaikan bendera di Sorong untuk menyuruh pulang para terdakwa karena tidak tahu lagi mau pegang pada siapa, mengingat bahwa atasannya di Jayapura menyetujui penaikan bendera. Suasana serba kabur.
10. Akhirnya perayaan 1 Desember 1999 dijalankan dengan sangat tertib dan hikmat, sedangkan aparat keamanan membiarkan Satgas Papua sendiri bertanggungjawab penuh atas keamanan pada saat itu.
11. Yang menarik juga ialah bahwa selama bulan November 1999 baik Kapolda (tgl. 5 November) maupun Pangdam (tgl. 26 November) diganti. Kedua pejabat baru mulai sosialisasikan suatu “pendekatan kasih sayang” dan mencari jalan untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap pihak keamanan. Maka tak terduga lagi bahwa sehari setelah perayaan 1 Desember pihak keamanan sekali lagi memakai kekerasan; kali ini untuk mengakhiri penaikan bendera di Timika (dimana bendera telah berkibar sejak 10 November 1999). Tindakan yang sama terulang lagi di Nabire pada akhir bulan Februari 2000 dengan mentargetkan Satgas Papua sebagai sasaran

utama. Sekali lagi beberapa orang ditembak mati langsung; sedangkan di Fakfak (awal Maret 2000) untuk pertama kali Satgas Merah Putih bentrok dengan Satgas Papua. Suatu suasana yang menakutkan mulai diciptakan, lebih-lebih dengan memakai sekelompok masyarakat melawan sekelompok lain masyarakat sendiri (suatu konflik horisontal mulai tercipta).

12. Sewaktu berjalannya baik MUBES maupun Kongres Papua II pihak keamanan membiarkan Satgas Papua menjaga ketertibannya. Suatu hal yang sangat mengganggu (dan sulit untuk dimengerti) ialah bahwa baik se usai MUBES maupun se usai Kongres Papua II sejumlah pemimpin dipanggil oleh pihak polisi untuk diinterogasi dan selanjutnya untuk dituduh “karena terlibat dalam kegiatan yang tidak sah”. Baik MUBES maupun Kongres diselenggarakan dengan “persetujuan” pihak keamanan dan dalam kedua hal pimpinan aparat keamanan sendiri menyatakan bahwa hasil perundingan dapat diterima. Maka sikap aparat keamanan tetap dialami sebagai hal yang sangat mendua.
13. Kemenduaan sekali lagi dibuktikan se usai Kongres Papua II karena ternyata “personil TNI” sedang terlibat dalam pengadaan suatu angket dimana masyarakat biasa di kampung diminta untuk mengisi suatu formulir dengan menyatakan apakah mendukung M(erdeka) atau O(tonomi)? Walaupun pihak resmi menyangkal keterlibatannya sudah pasti bahwa personil TNI terlibat (baik di Taja maupun di Biak dan siapa tahu di tempat mana lain lagi).

Berdasarkan pokok-pokok yang disebutkan di atas, kiranya menjadi jelas bahwa suasana masyarakat Papua menjadi serba kabur, mengambang, seakan-akan segala sesuatu diperbolehkan. Hal ini muncul karena pihak penguasa yang diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum tidak mengambil langkah pasti dan cenderung bersikap ‘membiarkan’. Akibatnya, di segala segi kehidupan, hukum dirasakan tidak berfungsi lagi.

Bahan yang dapat memberikan kejelasan lanjutan adalah:

1. Maklumat Kapolda IrJa
2. Socio-political notes (terlampir)

IV Pertimbangan-pertimbangan ke depan

Melihat ke depan kami dapat menarik perhatian pada sejumlah pertimbangan atau saran, sbb.:

1. Pertama-tama suatu iklim keterbukaan perlu diciptakan. Iklim itu hanya dapat tercipta jikalau semua pihak bersedia untuk mengambil sikap “mendengar dulu” untuk memahami betul apa yang sebenarnya terjadi serta latarbelakangnya.
2. Pemahaman akan situasi perlu terungkap dalam suatu pengakuan jelas oleh pihak yang berkuasa (baik instansi kenegaraan –DPR-pemerintah sipil maupun pihak TNI/Polri) bahwa telah melakukan kesalahan-kesalahan. Pengakuan demikian sangat dibutuhkan untuk menghindari kesan bahwa hanya satu pihak yang bisa bersalah, ialah rakyat. Pihak yang lain: kebal salah.
3. Supaya iklim yang kami maksudkan itu tercipta perlunya segala macam interogasi tanpa alasan yang nyata dihentikan total; sikap mendua aparat keamanan tidak membantu sama sekali apalagi kalau sikap itu tercampur dengan pemanfaatan unsur keagamaan. Pengadaan angket pasca Kongres Papua II oleh personil TNI adalah indikasi tambahan lagi kenapa perubahan iklim sangat bergantung pada kejujuran pihak aparat keamanan.
4. Mengingat tekanan pada pelurusan sejarah yang dikehendaki oleh Bangsa Papua sangat dianjurkan supaya suatu penelitian terhadap fakta-fakta sejarah yang dimaksudkan diadakan secara bersama dan dalam suatu keterbukaan yang menyegarkan.
5. Pencabutan status daerah DOM dari seluruh wilayah Papua bulan Oktober 1998, hendaknya diikuti dengan pengurangan nyata jumlah unsur TNI non organik; justru unit TNI ini sering bertindak secara tidak wajar dan tersembunyi. Kesan kuat bahwa peran mereka sama sekali tidak berkurang sejak status DOM dicabut.
6. Selama aparat keamanan masih melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti baru-baru ini di Nabire, pihak TNI/Polri tetap dialami sebagai pelanggar HAM; suatu tuduhan yang didukung oleh fakta-fakta. Alangkah baiknya dominasi aparat keamanan di wilayah Papua dihilangkan, dan pemerintah sipil diberikan peluang untuk menunjukkan diri sebagai pemegang kuasa di wilayah.
7. Suatu transparansi dari segala pihak yang berkuasa sangat dibutuhkan, sehingga apa yang benar bisa dilihat oleh masyarakat sebagai yang benar, dan apa yang salah dapat dilihat sebagai yang salah.
8. Perlu ada suatu dialog yang sangat urgen untuk menetapkan kembali peranan masing-masing unsur pengendali keamanan; dalam hal ini secara khusus perlu diadakan suatu perundingan dengan Pemimpin-Pemimpin Adat mengenai kedudukan serta peran Satgas Papua, supaya status dan fungsinya jelas dan diketahui masyarakat luas. Sekaligus segala usaha oleh pihak TNI untuk membentuk suatu Satgas tandingan (Satgas Merah Putih) dihentikan total. Unsur ini sangat penting karena menurut pengamatan kami polarisasi antar kedua “unsur keamanan” ini sangat

membahayakan suasana kemasyarakatan dan akan meruncikan (polarisasi) segala perjuangan yang wajar menjadi bentrokan radikal tanpa batas.

9. Yang tidak kalah urgen adalah penegakan hukum (secara khusus hukum pertanahan) di wilayah Papua. Karena kurang jelas pengakuan negara terhadap unsur hak ulayat, ditambah dengan semangat perjuangan Aspirasi M, masyarakat mulai bertindak diluar batas kewajaran dan mulai main hakim sendiri. Gejala ini makin kentara dalam sejumlah perkara tanah yang sedang terdapat maupun dalam aksi pemalangan sejumlah kantor pemerintah maupun swasta. Perlu merumuskan kembali hukum pertanahan hingga menghargai hak ulayat sekaligus menjamin kepentingan rakyat kecil secara luas.
10. Untuk menciptakan suatu iklim dialog, langkah maju yang sudah dibuat oleh Presiden Wahid seperti pengakuan atas kesalahan negara dan peresmian “lisan” nama Papua hendaknya ditindaklanjuti dengan [a] menanganai sejumlah kasus pelanggaran HAM dengan serius dalam wujud peradilan HAM yang efektif, dan [b] meresmikan secara formal nama Papua sebagai wujud pengakuan atas jati diri rakyat Papua.
11. Syarat dialog sejati lainnya adalah kesediaan pemerintah untuk meninjau ulang seluruh kebijakan ekonomis yang tidak menumbuhkan keberdayaan rakyat Papua.
12. Suatu pengakuan terhadap Front Nasional Papua (FNP) sangat diharapkan karena menurut penilaian kami FNP dapat dijadikan sarana utama untuk mengangkat GERASEM pada tingkat dialog dan perjuangan politik yang sehat dan wajar.
13. Secara khusus pihak pemerintah perlu memberikan peluang bagi para pegawainya serta kaum intelektual untuk berperan lebih dalam gerakan masyarakat di wilayah Papua. Sampai saat ini sangat kentara bahwa kaum intelektual kurang hadir dalam pembenahan gerakan masyarakat, karena mereka merasa ‘takut’, tidak diizinkan untuk ‘bicara secara bebas’ mengingat statusnya sebagai pegawai negeri dsb. Ketidakhadiran kelompok ini sangat merugikan bobot perjuangan dewasa ini dan melestarikan suatu “kekaburan” karena tidak jelas sejumlah tokoh masyarakat sebenarnya ada di pihak siapa.
14. Akhirnya boleh dikemukakan bahwa lembaga-lembaga keagamaan masih cukup dipercaya di wilayah Papua, hingga dapat diandalkan sebagai unsur perantara dalam dialog yang mutlak dibutuhkan. Gereja-gereja bersedia untuk mengambil peranan demikian, asal tetap jelas bahwa Gereja-Gereja (atau unsur keagamaan) tidak disalahgunakan oleh pihak berwajib.

Sekianlah pandangan yang dapat kami sampaikan selaku Pimpinan Gereja Katolik di Papua, dan atas segala perhatian bapak Presiden kami sangat berterima kasih.

Mgr. Jacob Duivenvoorde MSC

Mgr. Leo L. Ladjar OFM

Uskup Agung Merauke

Uskup Jayapura